



Pencairan ADD Langsung Dilakukan Dua Termin

GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Gunungkidul 2025 berjalan lancar. Dari 144 kalurahan, hingga saat ini yang belum mencairkan anggaran tinggal 14 kalurahan.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Waziroh, mengatakan pagu ADD 2025 mencapai Rp123,94 miliar. Hingga saat ini proses pencairan masih berlangsung.

“Untuk alokasi bervariasi karena besaran ADD di setiap kalurahan tidak sama. Mayoritas kalurahan juga sudah mencairkan dan tinggal 14 kalurahan yang masih berproses. Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, menjadi yang terakhir mengurus pencairan,” katanya, Jumat (7/2).

► Untuk pencairan Januari 2025 terkendala administrasi karena kalurahan harus menyelesaikan penyusunan APBKal serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di 2024.

► ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh kalurahan, selain dana desa dari Pusat.

Dia menjelaskan, pencairan ADD berlangsung setiap bulan. Waziroh tidak menampik untuk pencairan Januari 2025 sedikit terkendala masalah administrasi karena kalurahan harus menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran di 2024. “Butuh proses sehingga mundur sedikit pencairannya. Untuk Februari tidak masalah, bahkan ada kalurahan yang mengurus pencairan dua termin sekaligus [Januari dan Februari],” katanya.

Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Suhadi, mengatakan jajarannya sudah mengurus untuk pencairan

ADD termin pertama 2025. Proses pencairan juga sudah dilakukan dan anggaran yang turun dipergunakan sesuai dengan ketentuan berlaku. “ADD cair setiap bulan. Tapi, di awal tahun ini biasanya molor dan itu bukan menjadi persoalan,” katanya.

Dia menjelaskan, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh kalurahan, selain gelontoran dana desa dari Pemerintah Pusat. Fungsi ADD untuk menunjang kegiatan operasional kalurahan, dan salah satunya dipergunakan membayar penghasilan tetap (siltap) pamong dan staf maupun lurah. “Kalau ADD belum cair, maka siltap yang belum dibayarkan. Tapi, hanya di awal tahun saja dan setelah itu akan lancar seperti biasa. Kondisi ini juga terjadi di semua kalurahan,” katanya.

Menurutnya, untuk siltap ada kenaikan dengan rata-rata di kisaran Rp70.000 per pamong. Hanya saja, peningkatan tertinggi terjadi pada staf kalurahan dikarenakan kenaikan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten yang berlaku. “Jadi ada penyesuaian, maka ada peningkatan pagu ADD. Salah satunya untuk mengkaver naiknya siltap perangkat dan lurah,” katanya.